

## ABSTRAK

Parkir merupakan suatu keadaan yang mana pengemudi meninggalkan kendaraannya dalam keadaan tidak bergerak untuk sementara waktu. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor di Indonesia berdampak pula pada perkembangan sektor usaha jasa perparkiran. Tentu dalam keberlangsungan usaha perparkiran diperlukan suatu perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Banyaknya konsumen dan pelaku usaha dalam sektor usaha perparkiran menimbulkan cara yang paling efektif dalam mengadakannya suatu perjanjian perparkiran antara konsumen dan pihak pelaku usaha, perjanjian ini yang kemudian disebut sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibentuk sering kali mencantumkan muatan klausula eksonerasi, hal ini yang kemudian menjadi topik dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian konstruksi hukum perparkiran yang digunakan oleh Candi Plasa Semarang serta mengetahui keabsahan perjanjian parkir Candi Plasa Semarang.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan kajian dokumen. Metode yang adalah metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan karcis parkir Candi Plasa Semarang maka didapati hak dan kewajiban para pihak, yang mana hal ini memiliki kecenderungan terhadap penerapan perjanjian sewa lahan, yang artinya pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kendaraan yang dimiliki oleh konsumen. Penerapan perjanjian sewa lahan tidak sesuai dengan konstruksi hukum perparkiran di Indonesia yang mana dalam perjanjian perparkiran maka berlaku konsep perjanjian penitipan barang di mana pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kendaraan bermotor konsumen yang menjadi objek titipan sebagaimana hal ini ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 2078 K/Pdt/ 2009. Perjanjian parkir yang dibuat dalam bentuk baku dan memuat klausula eksonerasi maka batal demi hukum, hal ini demikian oleh sebab perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara untuk adanya suatu sebab yang halal sebagai mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung No. 1966 K/PDT/2005.

**Kata Kunci** : Perjanjian Baku, Eksonerasi, Parkir

## **ABSTRACT**

*Parking is a situation where the driver leaves his vehicle in a state of not moving for a while. The increase in motorized vehicle users in Indonesia has also had an impact on the development of the parking service business sector. In the continuity of the parking business, an agreement is needed to determine the rights and obligations of each party. The large number of consumers and business actors in the parking business sector has led to the most effective way of concluding a parking agreement between consumers and business actors, this agreement which is then referred to as a standard agreement. The standard agreements that are formed often contain exoneration clauses, this is the topic of this research. The purposes of this research are to identify the suitability of the parking legal construction used by Candi Plasa Semarang and to determine the validity of the Candi Plasa Semarang parking agreement.*

*This research uses a normative juridical approach. The specification of the research is descriptive-analysis. The type of data used in is secondary data considering that this study uses a juridical-normative method. The data collection technique is data collection by means of literature study and document review. The method is a qualitative data analysis method.*

*Based on the Candi Plasa Semarang parking ticket, the rights and obligations of the parties are found, which has a tendency towards implementing land lease agreements, which means that business actors are not responsible for vehicles owned by consumers. The implementation of land lease agreements is not in accordance with the legal construction of parking in Indonesia where in the parking agreement the concept applies goods safekeeping agreement where the business actor is fully responsible for the consumer's motorized vehicle which is the object of safekeeping as this is confirmed through Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2078 K/Pdt/ 2009. A parking agreement that is made in standard form and contains an exoneration clause is null and void, this is because the agreement does not fulfill the terms of the agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code for the existence of a lawful cause as emphasized in RI Supreme Court Decision Supreme Court Decision No. 1966 K/PDT/2005.*

**Keywords** : *Standart Agreement, Exoneration, Parking*